

**DAYA SAING USAHATANI KARET RAKYAT DI DESA KEMBANG TANJUNG
KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

*(Competitiveness of the Rubber Farming in the Village of Kembang Tanjung of South Abung
Subdistric, North Lampung Regency)*

Alghoziyah, R. Hanung Ismono, Wuryaningsih Dwi Sayekti

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Bandar Lampung 35145, Telp. 08237202227, e-mail : alghoziyahdezia@gmail.com

ABSTRACT

The purposes of this research are to find out the financial viability of smallholder rubber farming in Kembang Tanjung Village and the competitiveness of smallholder rubber farming in Kembang Tanjung village. This research was conducted in Kembang Tanjung, Subdistrict of South Abung, North Lampung regency. The numbers of samples in this study were 63 people obtained by proportional random sampling. The analytical methods used to answer the goals were financial analysis method and Policy Analysis Matrix (PAM). The results obtained from this research showed that smallholder rubber farming in Kembang Tanjung are profitable and feasible. The smallholder rubber farming at Kembang Tanjung has competitiveness (competitive and comparative advantage), it could be seen by the PCR value as 0,17 (<1) and the DRC amounted to 0,09 (<1). The indicator means that the commodity of smallholder rubber farming at Kembang Tanjung village emerging government policies in term of improving production efficiency which was the policy in subsidizing fertilizers for farmers.

Key words: competitiveness, financial feasibility, PAM, rubber.

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang mendukung kegiatan industri. Perkebunan merupakan bentuk kegiatan pertanian yang dilakukan dengan mengusahakan tanaman khususnya tanaman tahunan pada areal yang luas. Tanaman tahunan yang dibudidayakan dalam kegiatan perkebunan antara lain kakao, kelapa, kopi, karet, dan beberapa tanaman tahunan lain. Salah satu komoditas sektor perkebunan yang menjadi unggulan di Indonesia yaitu karet. Areal perkebunan karet di Indonesia pada tahun 2013 seluas 3,4 juta ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung (Direktorat Jenderal Perkebunan 2013).

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu sentra produksi karet di Provinsi Lampung. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2014), Kabupaten Lampung Utara memiliki perkebunan karet seluas 19.143 ha dengan produksi sebesar 9.871 ton dan produktivitas sebesar 515,645 kg/ha. Kecamatan Abung Selatan merupakan salah satu dari 23 Kecamatan sentra produksi karet. Desa Kembang Tanjung dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan

daerah tersebut memiliki tingkat produktivitas karet tertinggi yaitu 705,68 kg/ha.

Menurut Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Abung Selatan, petani karet di Desa Kembang Tanjung menjual bahan olah karetnya kepada pabrik pengolahan melalui pedagang perantara (tengkulak) di tingkat desa, kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. Adanya pedagang perantara yang berjenjang dalam saluran pemasaran karet rakyat di wilayah tersebut membuat harga di tingkat petani semakin rendah (Hasyim 2012).

Menurut Kepala BP3K Kecamatan Abung Selatan, kenaikan biaya-biaya produksi di sektor usaha menyebabkan tidak terciptanya keunggulan bersaing dalam harga jual produk. Harga jual karet di tingkat petani yang rendah tidak dapat dipisahkan dari harga karet pasaran internasional. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas karet, selain ditekankan pada peningkatan penerimaan devisa negara diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan petani. Permasalahan yang dihadapi petani karet di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yaitu tingkat produktivitas yang semakin menurun karena

tanaman karet berumur tua dan buruknya sistem manajemen kebun. Pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan produksi melalui penggunaan bibit unggul yang bermutu, penggunaan koagulan yang dianjurkan yaitu asam semut serta penggunaan dosis pupuk yang sesuai.

Menurut Drajat dan Hendratno (2009), kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas karet, selain ditekankan pada peningkatan penerimaan devisa negara diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan petani. Pendapatan petani merupakan refleksi, produktivitas kebun dan mutu bahan olah yang dihasilkan serta tataniaganya yang menentukan bagian harga bersih yang diterima petani.

Sebagian besar lahan perkebunan rakyat terletak di daerah dengan sarana transportasi dan sumberdaya ekonomi yang relatif terbatas. Selain itu skala usahatani karet rakyat umumnya rendah dengan hasil produksi berupa slab dengan mutu yang belum baku. Sementara dengan program crumb rubberisasi, ternyata pusat-pusat pengolahan karet remah pada umumnya berlokasi di sekitar ibukota propinsi atau kota-kota lainnya yang dekat dengan fasilitas pelabuhan ekspor, sehingga terdapat jarak yang cukup jauh antara pusat-pusat produksi karet rakyat dengan pusat-pusat pengolahannya.

Kebijakan strategis pembangunan perkebunan secara nasional meliputi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan umum adalah membangun perkebunan yang berorientasi kepada pasar melalui peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat sehingga peran pemerintah hanya menyediakan fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana, IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan regulasi yang didasarkan kepada mekanisme insentif dan disentif. Kebijakan teknis mencakup: a) Kebijakan pemberdayaan masyarakat perkebunan yang dioperasionalkan melalui upaya pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan IPTEK dengan meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penilaian kinerja serta pengembangan karier. b) Kebijakan peningkatan daya saing dioperasionalkan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, efisiensi, mutu dan promosi. c) Kebijakan investasi melalui upaya regionalisasi, penataan kembali kepemilikan, optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU), pemanfaatan IPTEK hasil litbang, diversifikasi usaha tanaman dan jaminan keamanan berusaha. d) Kebijakan restrukturisasi dan renovasi kelembagaan dioperasionalkan melalui upaya pembentukan

lembaga keuangan alternatif, restrukturisasi, renovasi dan pengembangan lembaga penyuluhan, lembaga petani, lembaga pemasaran, lembaga usaha dan pengembangan jejaring kerja.

Untuk mengembangkan potensi perkembangan karet di Indonesia Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/PT.140/7/2006 tentang Kebijakan Pengembangan Komoditas Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan salah satu komoditas yang dikembangkan adalah karet. Pengembangan karet Indonesia ke depan perlu didasarkan pada perencanaan yang lebih terarah dengan sasaran yang lebih jelas serta mempertimbangkan berbagai permasalahan, peluang dan tantangan yang sudah ada serta yang diperkirakan akan ada sehingga pada gilirannya akan dapat diwujudkan agribisnis karet yang berdaya saing dan berkelanjutan serta memberi manfaat optimal bagi para pelaku usahanya secara berkeadilan (Drajat dan Hendratno 2009).

Konsep daya saing adalah sesuatu yang sangat dinamis, dimana keunggulan saat ini bisa saja menjadi ketidakeunggulan di masa yang akan datang (Pahan 2006). Kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing daerah dan kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap daerah-daerah lain (Abdullah *et al* 2002). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan finansial usahatani karet dan daya saing usahatani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan salah satu sentra perkebunan karet rakyat yang ada di Provinsi Lampung. elbada Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung yang tergabung dalam kelompok tani. Jumlah populasi sebanyak 354, jumlah sampel dari jumlah populasi ditentukan dengan rumus (Sugiaro *et al* 2003).

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- S² = Variasi sampel (5%=0,05)
- Z = Tingkat kepercayaan (95%=1,96)
- d = Derajat penyimpangan(0,05)

Berdasarkan perhitungan pada persamaan (1), maka diperoleh jumlah sampel petani karet dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 orang. dengan pembagian alokasi proporsional sampel petani karet tiap kelompok tani ditentukan dengan rumus *simple random sampling*.

$$n_a = \frac{N_a}{N} \times n \quad \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- n_a = Jumlah sampel kelompok tani a
- n = Jumlah sampel keseluruhan
- N_a = Jumlah populasi kelompok a
- N = Jumlah populasi keseluruhan

Berdasarkan perhitungan pada persamaan (2), diperoleh proporsi sampel petani karet untuk Tunggul Makmur sebanyak 8 orang, Harapan Makmur sebanyak 11 orang, Tunas Makmur sebanyak 8 orang, Harapan Maju sebanyak 6 orang, Ngundi Waluyo sebanyak 7 orang, Tani Terpadu sebanyak 8 orang, Giat sebanyak 7 orang, Panca Jaya sebanyak 8 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan observasi menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian.

Data dianalisis dengan menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Elbadawi *et al.* (2012), Feryanto (2010), Meliyana (2013), Waqar *et al.* (2007). Komoditas karet yang diteliti merupakan tanaman tahunan maka analisis PAM yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Net Present Value* (NPV) dimana hal tersebut sejalan dengan penelitian Pranoto (2011), Rodgers (2008); Mantau (2009). Matrix PAM dan indikator dampak kebijakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM)

	Biaya			Profit
	Output	Input Tradable	Input Non Tradable	
Harga privat	A	B	C	D
Harga sosial	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Pearson, Gotsch dan Bahri (2005)

Keterangan:

- Keuntungan Finansial (D) = A-(B+C)
- Keuntungan Ekonomi (H) = E-(F+G)
- Transfer Output (OT) (I) = A-E
- Transfer Input Tradable (IT) (J) = B-F
- Transfer Input Nontradable (FT) (K) = C-G
- Transfer Bersih (NT) (L) = I-(K+J)
- Rasio Biaya Privat (PCR) = C/(A-B)
- Rasio BSD (DRC) = G/(E-F)
- Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A/E
- Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = B/F
- Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = (A-B)/(E-F)
- Koefisien Keuntungan (PC) = D/H
- Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP) = L/E

Asumsi yang digunakan :

1. Nilai tukar dollaR sebesar Rp12.616/US\$ (nilai tukar rata-rata pada tahun 2015 menurut BI).
2. Tingkat suku bunga privat yang digunakan adalah suku bunga pinjaman yang berlaku di Bank Indonesia (BI), yaitu 12,92 (suku bunga rata-rata pada tahun 2015) dan suku bunga sosial yaitu 19,25 didapat dari suku bunga privat ditambah inflasi sebesar 6,33 (Bank Indonesia 2015)

Pada PAM, penerimaan, biaya dan keuntungan dibedakan menurut harga privat dan harga sosial. Perbedaan harga tersebut menunjukkan dampak kebijakan pemerintah serta distorsi pasar *input* dan *output* . Harga sosial *input tradable* yang diekspor (karet, pupuk urea, gramaxone dan round up) menggunakan harga paritas ekspor (*FOB*), sedangkan untuk barang yang diimpor (NPK phonska, KCl) menggunakan harga paritas impor (*CIF*) (Gittinger 1986). Harga sosial untuk *input nontradable*, seperti bibit, pupuk kandang, tenaga kerja, lahan, peralatan pertanian adalah sama dengan harga privatnya. Hal ini karena diasumsikan *input-input* tersebut tidak diperdagangkan di pasar internasional.

Untuk menghitung seluruh penerimaan dan biaya yang digunakan akan dihitung dalam *present value* yang dianalisis dalam perhitungan kelayakan finansial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Astanu (2013) tentang kelayakan finansial budidaya tanaman pala di Kecamatan Gisting. Menurut Nitisemito dan Burhan (2004) dalam Hermayanti (2013), rumus *Present Value* adalah

sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{(1+i)^t} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- P = Nilai tunai (pada tahun 0)
- F = Nilai nanti
- i = Tingkat bunga
- t = Tahun ke-....

Present value benefit (penerimaan) dapat dirumuskan sebagai:

$$PV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots(4)$$

dan *present value cost* (biaya) dapat dirumuskan sebagai:

$$PC = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots(5)$$

Sedangkan nilai tunai bersih dirumuskan sebagai:

$$NPV = PVB - PVC$$

$$= \sum \frac{B_t}{(1+i)^t} - \sum \frac{C_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots(6)$$

di mana:

- Bt = penerimaan pada tahun t
- Ct = pengeluaran atau biaya pada tahun t

Tiga kriteria NPV, yaitu:

- (1). Bila NPV > 0, maka menguntungkan dan dapat dilaksanakan.
- (2). Bila NPV < 0, maka merugikan dan tidak layak untuk dilaksanakan.
- (3). Bila NPV = 0, maka tidak untung dan tidak rugi (*break even point*).

Net present value dapat dihitung dengan mengalikan arus penerimaan dan pengeluaran tiap tahun dengan *discount factor*-nya. *Discount factor* adalah nilai *present value* uang seharga Rp1,00 yang akan diterima pada tahun ke-t, dengan rumus (Prawirosentono 2002) :

$$df = \frac{1}{(1+i)^t} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan : df = *discount factor*

Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C Ratio)

Menurut Kadariah (1999), *Gross Benefit Cost Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah *present value* dari benefit kotor dengan jumlah *present value* dari biaya kotor. Secara matematis *Gross B/C* dapat dirumuskan :

$$GrossB / C = \frac{\sum_{t=0}^t PV (B)}{\sum_{t=0}^t PV (C)} \dots\dots\dots (8)$$

Kriteria pada pengukuran ini adalah.

- 1) Jika *Gross B/C* > 1, maka kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan.
- 2) Jika *Gross B/C* < 1, maka kegiatan usaha tidak layak untuk dilaksanakan
- 3) Jika *Gross B/C* = 1, maka kegiatan usaha dalam keadaan impas.

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)

Menurut Kadariah (1999), *Net Benefit Cost Ratio* merupakan perbandingan antara *present value net benefit* yang bernilai positif dengan *present value net benefit* yang bernilai negatif. Secara matematis *Net B/C* dapat dirumuskan :

$$NetB / C = \sum_{t=0}^{t=n} \frac{(B_t - C_t)(DF)}{(C_t - B_t)(DF)} \dots\dots\dots(9)$$

Kriteria pada pengukuran ini adalah.

- 1) Jika *Net B/C* > 1, maka kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan.
- 2) Jika *Net B/C* < 1, maka kegiatan usaha tidak layak untuk dilaksanakan.
- 3) Jika *Net B/C* = 1, maka kegiatan usaha dalam keadaan impas.

Internal Rate of Return (IRR)

Menurut Kadariah (1999), *Internal Rate of Return* (IRR) merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau dengan kata lain tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Secara matematis IRR dapat dirumuskan sebagai :

$$IRR = i_1 + \left[\frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \right] (i_2 - i_1) \dots\dots\dots(10)$$

Dengan kriteria.

- 1) Jika $IRR > i$, maka kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan.
- 2) Jika $IRR < i$, maka kegiatan usaha tidak layak untuk dilaksanakan.
- 3) Jika $IRR = i$, maka kegiatan usaha dalam keadaan impas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Responden

Petani karet Desa Kembang Tanjung rata-rata 45 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Esiobu dan Onubuogu (2014), bahwa mayoritas petani berumur 41 sampai 50 tahun dalam usia produktif dan lebih mungkin untuk mengadopsi inovasi baru. Petani karet Desa Kembang Tanjung sebagian besar tingkat pendidikan berada pada tingkat SMA. Petani karet di daerah penelitian memiliki rata-rata luas lahan 1 sampai 5 ha dengan status kepemilikan lahan milik sendiri.

Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Karet Desa Kembang Tanjung

Analisis kelayakan finansial usahatani karet Desa Kembang Tanjung didasarkan atas umur tanaman yaitu umur 0 hingga 22 tahun yang dihitung menggunakan *discount factor* pada tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) 12,92 persen (Bank Indonesia 2015). Hasil penelitian usahatani karet rakyat dapat dilihat pada Tabel 2.

Net Present Value (NPV)

Nilai *Net Present Value* (NPV) Desa Kembang Tanjung diperoleh nilai positif sebesar Rp184.672.001,59 lebih besar jika dibandingkan dengan usahatani karet di Kecamatan Banjar Agung oleh Ayar (2007) yang hanya sebesar Rp53.703.299. Nilai NPV yang lebih besar dari 1 disimpulkan bahwa analisis finansial usahatani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung dan Kecamatan Banjar Agung layak dan menguntungkan untuk diteruskan. Perbedaan hasil nilai NPV tersebut dikarenakan biaya produksi yang dikeluarkan di Desa Kembang Tanjung sebesar Rp38.357.020 lebih rendah dibandingkan Kecamatan Banjar Agung sebesar Rp111.405.604 namun pendapatan di Desa Kembang Tanjung sebesar Rp223.029.022 lebih rendah dari Kecamatan Banjar Agung sebesar Rp400.889.046.

Tabel 2. Kriteria kelayakan

Kriteria	Desa	Kecamatan	Kriteria
	Kembang Tanjung	Banjar Agung (*)	
NPV	184.672.001	53.703.299	Layak
Gross B/C	5,81	2,22	Layak
Net B/C	7,05	3,00	Layak
IRR	48,00	23,54	Layak

Sumber: Ayar 2007

Gross B/C ratio

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Gross B/C* usahatani karet di Desa Kembang Tanjung sebesar 5,81 lebih besar dan lebih menguntungkan jika dibandingkan di Kecamatan Banjar Agung yang dilakukan oleh Ayar (2007) dengan nilai *Gross B/C* sebesar 2,22 yang berarti setiap Rp1,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp5,81 dan Rp2,22. Nilai *Gross B/C* lebih dari 1 menunjukkan bahwa usahatani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung dan Kecamatan Banjar Agung menguntungkan dan layak untuk diteruskan. Nilai *Gross B/C* pada Kecamatan Banjar Agung lebih rendah dari Desa Kembang Tanjung hal tersebut dilihat dari perbedaan harga karet yang di Kecamatan Banjar Agung Rp5.200/kg lebih rendah dibandingkan di Desa Kembang Tanjung yaitu Rp6.957/kg, serta besarnya penggunaan input sarana produksi dan harga input yang berbeda antara Kecamatan Banjar Agung dan Desa Kembang Tanjung.

Net B/C

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh nilai *Net B/C* usahatani karet rakyat Desa Kembang Tanjung sebesar 7,05 nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan usahatani karet rakyat di Kecamatan Banjar Agung oleh Ayar (2007) yaitu sebesar 3,0. Nilai tersebut berarti bahwa setiap Rp1,00 biaya bersih yang telah dikeluarkan menghasilkan penerimaan bersih sebesar Rp3,0 dan Rp7,05. Berdasarkan hasil tersebut maka usahatani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung dan Kecamatan Banjar Agung menguntungkan dan layak untuk diteruskan karena nilai *Net B/C* lebih besar dari 1. Perbedaan hasil tersebut dikarenakan harga karet yang didapat di Kecamatan Banjar Agung Rp5.200/kg lebih rendah dibandingkan di Desa Kembang Tanjung yaitu Rp6.957/kg.

Internal Rate of Return (IRR)

Hasil perhitungan tingkat pengembalian internal investasi usahatani karet rakyat di Desa Kembang

tanjung adalah 48 persen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian di Kecamatan Banjar Agung (Ayar 2007) didapat nilai IRR sebesar 23,54 persen. Perbedaan nilai yang didapat pada kedua penelitian ini dikarenakan tingkat suku bunga yang digunakan berbeda, untuk Desa Kembang Tanjung tingkat suku bunga sebesar 12,92 persen dan di Kecamatan Banjar Agung 11,8 persen serta dapat dilihat dari besarnya nilai NPV yang positif dan negatif. Nilai IRR tersebut lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa usahatani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung dan usahatani karet di Kecamatan Banjar Agung layak untuk diteruskan.

Analisis daya saing usahatani karet rakyat Desa Kembang Tanjung

Berdasarkan perhitungan, hasil analisis matrik PAM usahatani karet Desa Kembang Tanjung dapat dilihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa keuntungan usahatani karet rakyat di Desa Kembang Tanjung layak untuk diusahakan baik secara finansial maupun ekonomi. Penerimaan pada harga privat sebesar Rp223.042.083 sedangkan penerimaan pada harga sosial adalah Rp391.426.585. Penerimaan lebih besar dari total biaya (*tradable* dan *nontradable*), yang berarti usahatani karet Desa Kembang Tanjung menguntungkan.

Nilai divergensi yang sebesar negatif Rp168.384.503 artinya adanya keadaan dimana kebijakan atau campur tangan pemerintah terkait subsidi pupuk yang diberikan kurang memberikan kontribusi yang efektif terhadap penerimaan yang didapatkan petani karet, sebaliknya apabila bernilai positif maka adanya kebijakan pemerintah telah mampu memberikan kontribusi yang efektif terhadap penerimaan dan pengeluaran dalam usahatani tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan kebijakan harga baik input maupun output yang mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif.

Perbedaan penerimaan tersebut diakibatkan adanya distorsi pasar dimana harga privat dan harga sosial yang berbeda, harga privat merupakan harga yang diterima petani sedangkan harga sosial diperoleh dari harga internasional. Harga *output* dapat berbeda antara harga yang diterima produsen dengan harga pada pasar internasional. Perbedaan ini karena adanya intervensi pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Kebijakan proteksi bagi masuknya barang impor

dan subsidi bagi produsen dalam negeri biasanya diterapkan pada situasi dimana suatu sektor tidak dapat bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri, karena misalnya barang-barang luar negeri lebih murah atau kualitasnya lebih baik atau penampilan lebih menarik sehingga melemahkan daya saing produk dalam negeri.

Keuntungan finansial berdasarkan yang diperoleh dari usahatani karet Desa Kembang Tanjung adalah sebesar Rp181.336.292 dan keuntungan ekonomi adalah sebesar Rp350.513.765. Perbedaan antara keuntungan finansial dengan keuntungan ekonomi yang terjadi menunjukkan adanya divergensi pada harga *output*, dimana harga privat *output* lebih rendah dari pada harga sosial *output* karena harga privat merupakan harga sebenarnya yang diperoleh ditingkat petani sedangkan harga sosial tersebut merupakan harga internasional dimana harga tersebut merupakan harga yang diterima negara konsumen.

Nilai divergensi negatif Rp169.177.473 artinya adanya distorsi pasar yang menyebabkan kebijakan atau campur tangan pemerintah tidak memberikan kontribusi yang efektif terhadap penerimaan yang didapatkan petani karet, sebaliknya nilai yang positif berarti kebijakan pemerintah telah mampu memberikan kontribusi yang efektif terhadap penerimaan dan pengeluaran dalam usahatani tersebut. Usahatani dianggap berdaya saing jika memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Keunggulan komparatif di dalam analisis PAM diukur dengan DRC (*Domestic Resource Cost*), sedangkan keunggulan kompetitif diukur dengan PCR (*Private Cost Ratio*). Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, petani akan berusaha meminimumkan rasio PCR. Semakin rendah nilai PCR, maka komoditas tersebut akan semakin memiliki keunggulan kompetitif. Nilai DRC dan PCR usahatani karet rakyat Desa Kembang Tanjung dapat dilihat pada Tabel 4.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai PCR karet di daerah penelitian kurang dari satu, yaitu sebesar 0,18. Nilai PCR karet < 1 berarti usahatani karet di Desa Kembang Tanjung mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat serta memiliki keunggulan kompetitif. Berdasarkan nilai PCR tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperoleh nilai tambah (keuntungan) sebesar Rp100 besar biaya *input* domestik yang harus dikeluarkan petani karet adalah sebesar Rp17,00. Nilai PCR tersebut menandakan bahwa usahatani karet di daerah penelitian memiliki keunggulan kompetitif.

Tabel 4. Nilai DRC dan PCR

No	Desa Kembang Tanjung		Kecamatan Cambai	
	Indikator	Nilai	Indikator	Nilai
1	DRC	0,17	DRC	0,77
2	PCR	0,09	PCR	0,43

Nilai DRC sebesar 0,09 berarti untuk memperoleh nilai tambah Rp100 diperlukan input *non tradable* (faktor domestik) sebesar Rp9,00. Nilai DRC tersebut menandakan bahwa komoditas karet di Desa Kembang Tanjung mempunyai daya saing atau keunggulan komparatif dan produsen mampu memproduksi satu unit nilai tambah dengan faktor domestik yang lebih rendah. Jika dibandingkan dengan usahatani karet di Kecamatan yang dilakukan oleh Sunandar (2007), hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien DRC di peroleh nilai 0,77 dan nilai koefisien PCR karet yaitu 0,43. Disimpulkan bahwa Desa Kembang Tanjung memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang lebih baik, hal ini karena nilai koefisien DRC (0,18) dan PCR (0,09) lebih rendah dibandingkan koefisien DRC (0,77) dan PCR (0,43) di Kecamatan Cambai.

Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif atau daya saing dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu melindungi petani dengan menerapkan kebijakan yang sifatnya melindungi petani karet contohnya menerapkan harga minimum karet yang selama ini belum ada kebijakan terhadap perlindungan harga karet akibatnya sampai saat ini harga karet yang terus menurun tidak dapat dihindarkan sehingga mempengaruhi pendapatan petani yang berdampak pada produksi karet yang dihasilkan kurang berkualitas. Selain itu adanya kebijakan subsidi pupuk yang diberlakukan pemerintah saat ini sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan usahatani karet Desa Kembang Tanjung.

Analisis dampak kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam suatu aktivitas pengembangan komoditas pertanian dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap pelaku dari sistem tersebut. Adapun kebijakan pemerintah terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. Besarnya subsidi pupuk pada tahun 2015 sebesar Rp35,7 triliun (Kemenkeu 2015).

Tabel 3. *Policy Analysis Matrix* (PAM) usahatani karet rakyat per hektar di Desa Kembang Tanjung

Variabel	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Input Tradable</i>	<i>Input Non-Tradable</i>	
Harga Privat	223.042.083	3.686.075	38.019.716	181.336.292
Harga Sosial	391.426.585	5.748.033	35.164.787	350.513.765
Divergensi	-168.384.503	-2.061.958	2.854.929	-169.177.473

Dampak kebijakan pemerintah terhadap *output*

Kebijakan pemerintah terhadap *output* berupa kebijakan perpajakan (peringan/pembebasan pajak ekspor atas komoditas karet), fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor, pemberian subsidi ekspor (tarif angkutan murah, kemudahan dalam mengurus ekspor), pembentukan asosiasi eksportir, devaluasi (menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing), menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, mengadakan perjanjian kerja sama ekonomi internasional (Hady 2004).

Pada Tabel 5 nilai OT negatif sebesar - Rp168.384.502,65 menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan pemerintah menguntungkan konsumen dengan terjadinya pengalihan surplus dari produsen ke konsumen. Nilai OT menunjukkan bahwa petani karet kehilangan keuntungan sebesar Rp168.384.502,65 per 1 ha. Hal tersebut disebabkan hambatan perdagangan seperti pajak yang diterapkan selain itu adanya ketidakseimbangan pasar yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan makroekonomi. Adanya kebijakan yang distorsif menyebabkan harga domestik berbeda dengan harga efisiensinya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sunandar (2007) di Kecamatan Cambai oleh nilai OT negatif sebesar Rp2.094,94 per kilogram boka. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh harga nilai tukar uang yang seharusnya sebagai akibat perdagangan dalam penentuan valuta asing, pajak ekspor, dan juga struktur pasar karet yang cenderung monopsoni mengakibatkan harga yang benar-benar diterima oleh petani sangat rendah sehingga petani cenderung sebagai penerima harga. Koefisien Proteksi *Output* Nominal (NPCO) adalah rasio antara penerimaan yang dihitung berdasarkan harga privat dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial.

Tabel 5. Kebijakan output

	Desa Kembang Tanjung		Kecamatan Cambai
	Nilai		Nilai
OT(Rp)	-168.384.502,65	OT (Rp)	-2.094,94
NPCO	0,57	NPCO	0,85

Alat ukur NPCO digunakan untuk melihat apakah suatu komoditas diproteksi atau tidak. Nilai NPCO usahatani karet sebesar 0,57 hal ini menunjukkan tidak efektifnya kebijakan proteksi harga yang dilakukan pemerintah terhadap harga *output* sehingga petani hanya menerima 57 persen dari harga yang seharusnya dibayar konsumen.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sunandar (2007) yaitu nilai NPCO < 1 yaitu 0,85 disimpulkan bahwa terdapat suatu kebijakan pemerintah yang menghambat ekspor komoditi karet baik berupa pemberlakuan pajak maupun hambatan ekspor lainnya. Apabila nilai NPCO > 1, maka terdapat kemungkinan adanya suatu kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga *output* (karet) di pasar domestik di atas harga efisiennya (harga dunia). Nilai NPCO yang lebih rendah dari satu menunjukkan bahwa petani tidak menerima insentif yang diberikan pemerintah. Aliran surplus dari produsen ke konsumen disebabkan oleh harga yang diterima oleh petani lebih rendah daripada harga pasaran internasional yang diakibatkan adanya distorsi pasar yang terjadi.

Kebijakan pemerintah terhadap *input*

Kebijakan pemerintah untuk membantu peningkatan produksi tidak saja pada harga *output* tetapi juga pada harga *input*. Adapun kebijakan pemerintah terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal : 27 November 2014 terhadap *input* yaitu berupa pemberian subsidi pupuk, bantuan langsung benih unggul, bantuan pestisida, serta permodalan bagi petani. Pemberlakuan subsidi *input* tersebut berlaku didaerah penelitian yaitu pada pupuk urea dan phonska harga yang diterima petani lebih rendah dari harga sosialnya.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap *input* ditunjukkan oleh nilai transfer *input* (IT), transfer faktor (FT), dan koefisien proteksi nominal *input* (NPCI) dapat dilihat pada Tabel 6. Nilai IT bernilai negatif yaitu -Rp2.061.958,17 nilai tersebut menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah diterima oleh petani. Kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi pupuk berjalan dengan baik sehingga petani membayar

input dengan harga yang lebih rendah sebesar -Rp2.061.958,17 dari jumlah biaya yang seharusnya dibayar oleh petani. Nilai Transfer Faktor (FT) menunjukkan nilai yang positif, yaitu Rp2.854.928,58.

Jika dibandingkan dengan Kecamatan Cambai oleh Sunandar (2007) nilai IT lebih rendah dari Desa Kembang Tanjung yaitu sebesar -Rp2.081,40 (Rp/kg). Nilai FT tersebut petani membayar Rp2.854.928,58 lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar pada *input* domestik.

Nilai Koefisien Proteksi Nominal *Input* (NPCI) sebesar 0,64 nilai tersebut menunjukkan bahwa harga *input* yang benar-benar dikeluarkan petani sebesar 64 persen dari harga sesungguhnya. Angka tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah atau distorsi pasar pada *input tradable* yang menguntungkan petani dan merugikan pihak yang memproduksi *input tradable* tersebut. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Cambai oleh Sunandar (2007) nilai NPCI yaitu sebesar 0,16 yang berarti bahwa harga *input* yang dikeluarkan petani sebesar 16 persen lebih rendah dari harga efisiennya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga *input* di Kecamatan Cambai lebih rendah dibandingkan di Desa Kembang Tanjung sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan Desa Kembang Tanjung yang mendapatkan penurunan harga hingga mencapai 64 persen.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap *input-output*

Kebijakan pemerintah pada *input-output* adalah analisis gabungan antara kebijakan *input* dan *output*. Kebijakan pemerintah terhadap *input-output* berupa kebijakan harga *input* (menghilangkan distorsi harga faktor produksi dengan memberikan subsidi pupuk dan pestisida) dan kebijakan harga terhadap *output* (menciptakan harga pasar yang benar-benar adil bagi para petani). Analisis dampak kebijakan terhadap keseluruhan *input-output* dalam usahatani karet dalam matrik PAM ditunjukkan oleh nilai Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Transfer Bersih (NT), Koefisien Keuntungan (PC), dan Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP), seperti dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Kebijakan input

No	Desa Kembang Tanjung		Kecamatan Cambai	
		Nilai		Nilai
1	IT (Rp)	-2.061.958,17	IT (Rp)	-2.081,40
2	FT (Rp)	2.854.928,58	FT (Rp)	-4.126,09
3	NPCI	0,64	NPCI	0,16

Tabel 7. Kebijakan *input-output*

No	Desa Kembang Tanjung		Kecamatan Cambai	
		Nilai		Nilai
1	NT (Rp)	-169.177.473,06	NT (Rp)	4.112,55
2	EPC	0,57	EPC	0,99
3	PC	0,52	PC	2,47
4	SRP	-0,43	SRP	0,27

Nilai Transfer Bersih (NT) menunjukkan nilai yang negatif yaitu -Rp169.177.473,06. Hal ini mengindikasikan bahwa petani karet mengalami kehilangan keuntungan sebesar Rp169.177.473,06 per hektar. Nilai NT yang negatif menunjukkan adanya distorsi paasar yang menyebabkan ketidakpastian sasaran kebijakan pemerintah terhadap *input-output* di Desa Kembang Tanjung. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Cambai oleh Sunandar (2007), nilai NT bernilai positif yaitu Rp4.112,55 per kg. Hal tersebut mempunyai arti bahwa terdapat kebijakan pemerintah terhadap *input-output* yang memberikan pengaruh ke petani di Kecamatan Cambai untuk meningkatkan produksi karet.

Nilai Koefisien Proteksi Efektif (EPC) sebesar 0,57 menunjukkan bahwa harga *output* dan harga *input tradable* yang diterima petani hanya sebesar 57 persen dari harga yang seharusnya (harga sosial), atau nilai tambah yang dinikmati petani secara aktual lebih rendah dari nilai tambah secara sosial atau yang seharusnya diterima apabila tidak terjadi distorsi kebijakan. Nilai EPC tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah memberikan subsidi pupuk pada petani dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) kurang memberikan keuntungan nyata bagi petani untuk berproduksi.

Nilai PC lebih rendah dari satu menunjukkan bahwa petani karet di Desa Kembang Tanjung masih menerima keuntungan yang lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diterima pada harga sesungguhnya (harga ekonomi). Nilai PC sebesar 0,52 menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima oleh petani karet hanya sebesar 52 persen dari keuntungan sosial. Nilai PC yang rendah mengindikasikan bahwa tidak efektifnya kebijakan

pemerintah yang merangsang untuk peningkatan produksi dan produktivitas pada petani karet.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sunandar (2007), nilai PC lebih besar dari 1 yang berarti bahwa di Kecamatan Cambai keuntungan petani karet lebih besar jika dibandingkan keuntungan sosialnya. Pada hasil tersebut kebijakan pemerintah di Kecamatan Cambai dalam *input-output* tersebut dapat membantu meningkatkan produksi karet petani. Nilai 2,47 ($PC > 1$) menunjukkan keuntungan petani sangat tinggi dengan adanya kebijakan dari pemerintah sebesar 147 persen dari keuntungan yang diterima petani tanpa kebijakan. Nilai SRP usahatani karet di Desa Kembang Tanjung sebesar -0,43.

Nilai negatif pada SRP menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengakibatkan keuntungan pelaku usahatani karet berkurang sebesar 43 persen dari keuntungan yang sesungguhnya diterima pada harga sosial. Nilai SRP menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang merugikan bagi petani karet, karena petani menerima subsidi negatif dan tidak adanya proteksi harga dari pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sunandar (2007) yang mendapatkan nilai SRP bernilai positif sebesar 0,27. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa terdapat kebijakan pemerintah dalam usahatani karet yang berakibat pada biaya yang dibayarkan petani terhadap *input* lebih rendah dari biaya imbalan (*opportunity cost*).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa usahatani karet rakyat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara menguntungkan bagi petani dan layak untuk diusahakan dengan nilai NPV sebesar Rp184.672.001,59, *Gross B/C* sebesar 5,81, *Net B/C* sebesar 7,05 dan IRR sebesar 48 persen. Usahatani karet Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara berdaya saing dengan nilai PCR sebesar 0,17 dan DRC sebesar 0,09.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah P, Alisjahbana AS, N Effendi dan Boediono. 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
 Astanu DA, Ismono RH, Rosanti N. 2013. Analisis

- kelayakan finansial budidaya intensif tanaman pala di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *JIA*, 1 (3) : 218-225. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/576>. [4 April 2016].
- Ayar JA. 2007. Analisis Kelayakan Finansial Dan Ekonomi Serta Pemasaran Karet Rakyat Di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- BI [Bank Indonesia]. 2015. *Tingkat Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Uang Periode 2014-2015*. <http://www.bi.go.id>. [28 Oktober 2015].
- Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. 2014. *Statistik Perkebunan tahun 2013*. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Lampung.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013. *Statistik Perkebunan Indonesia 2008- 2013: Karet (Rubber)*. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Drajat B dan Hendratno S. 2009. Strategi Pengembangan Karet Indonesia. *Jurnal Penelitian Karet*, 27 (1) : 13-28. <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/abstrak/karet.pdf>. [20 Desember 2014].
- Elbadawi, Elsedig, Arshad, Fatimah, Mohammed, Zainal A, Ismail, Mansor. 2012. Assessing the competitiveness of sheep production in selected states in Sudan. *Journal of Agricultural Science*, 5 (1) : 75-83. <http://www.ccsenet.org/journal>. [1 April 2016].
- Esiobu NS, Onubuogu GC. 2014. Determinant of income from pineapple production in Imo State, Nigeria : an econometric model approach. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5 (22) : 122-132. <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/viewFile/16739/17100>. [21 Desember 2015]
- Feryanto. 2010. Analisis daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas susu sapi lokal di Jawa Barat. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Gittinger JP. 1986. *Analisis Proyek-Proyek Pertanian; Edisi II*. Diterjemahkan Oleh Sutomo P dan Magin K. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Hady H. 2004. *Ekonomi Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hasyim AI. 2012. *Tataniaga Pertanian*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Hermayanti NW, Abidin Z, Santoso H. 2013. Analisis daya saing kelapa sawit di Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. *JIA*, 1 (2) : 44-52. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/130/134>. [2 Maret 2016].
- Kadariah, Lien K, Clive G. 1999. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mantau Z. 2009. Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung dan padi di Kabupaten Bilalang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Tesis*. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Meliyana R, Zakaria WA, Nurmayasari I. 2013. Daya saing lada hitam di Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. *JIA*, 1 (4) : 276-282. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/702>. [2 Maret 2016].
- Pahan I. 2006. *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pearson S, Gotsch C, dan Bahri S. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Pranoto SY. 2011. Dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan daya saing lada putih (*Muntok White Paper*) di Provinsi Bangka Belitung. *Tesis*. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Prawirosentono S. 2002. *Bahasan Komprehensif Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rodger A. 2008. Economic analysis of smallholder rubber agroforestry system efficiency in Jambi. *Tesis*. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sugiarto D, Siagian LS, Sunarto dan Oetomo DS. 2003. *Teknik Sampling*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Iwan S. 2007. Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengusahaan Komoditi Tanaman Karet Alam (*Havea Braziliensis*). *Skripsi*. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.